ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut di Negara-Negara ASEAN: Analisis Perbandingan Berdasarkan Systematic Literature Review

Fathurrahman Jamil[1], Steven Toar Sambouw[2], Bayu Asih Yulianto[3]
[1,2,3]Universitas Pertahanan Republik Indonesia
E-mail: fathurrahman.jamil@km.idu.ac.id[1], steven.toar@idu.ac.id[2], b.asyou@gmail.com[3]

Article History:
Received: 30 September 2026
Revised: 03 Oktober 2026
Accepted: 05 Oktober 2026

Keywords: *Tata Kelola Ruang Laut, Marine Spatial Planning, Ekonomi Biru, Maritim, Systematic Literature Review.*

Abstrak: *Pemanfaatan ruang laut di kawasan ASEAN menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan ekonomi biru, perluasan kawasan konservasi, pelayaran, perikanan, dan kepentingan maritim yang saling tumpang tindih, sementara kerangka tata kelola ruang laut yang terintegrasi di tingkat kawasan masih belum terbentuk secara memadai. Penelitian ini bertujuan menyintesis literatur ilmiah untuk membandingkan tata kelola pemanfaatan ruang laut di negara-negara ASEAN, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tantangan, dan faktor keberhasilannya, serta merumuskan model tata kelola yang relevan bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review mengacu pada protokol PRISMA 2020, dengan penelusuran pada sembilan basis data ilmiah publikasi periode 2015–2026, artikel tersebut kemudian dianalisis melalui sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola ruang laut ASEAN masih bersifat sektoral dengan variasi signifikan dalam kapasitas kelembagaan, ketersediaan perencanaan ruang laut, dan partisipasi pemangku kepentingan antarnegara. Singapura dan Vietnam menunjukkan kemajuan relatif, sementara Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor. Temuan ini penting karena mengonfirmasi bahwa fragmentasi kelembagaan, menjadi hambatan utama tata kelola ruang laut di kawasan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merumuskan model konseptual baru, ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework, yang dapat menjadi acuan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan ASEAN.*

PENDAHULUAN

Ruang laut merupakan sumber daya strategis yang menopang keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan keamanan bagi negara-negara pesisir, namun pemanfaatannya kini menghadapi tekanan akibat pertumbuhan sektor kelautan yang bersifat multiguna dan saling bersaing. Kompleksitas ini semakin nyata ketika berbagai sektor berkembang pesat tanpa kerangka spasial

yang memadai, sehingga menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut antarpengguna (Boussarie et al., 2023). Penanganan konflik dalam tata kelola kelautan dan pesisir yang kompleks ini tidak cukup hanya mengandalkan aturan, melainkan butuh kerja sama langsung dari semua pihak (Bellanger et al., 2020). Penelitian Prakoso et al. (2025) mengidentifikasi berbagai ancaman nonmiliter terhadap keamanan maritim Indonesia, yang meliputi illegal fishing, perompakan, penyelundupan, serta kerusakan lingkungan laut.

Marine Spatial Planning (MSP) muncul sebagai pendekatan yang dirancang untuk mengatasi persoalan tersebut melalui perencanaan spasial berbasis ekosistem yang mengalokasikan ruang laut secara rasional bagi berbagai kepentingan (Long et al., 2015). Perkembangan MSP berbasis ekosistem merupakan suatu pendekatan mengelola aktivitas maritim sekaligus memastikan kesejahteraan manusia dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan (Galparsoro et al., 2025). Tata kelola sumber daya laut yang efektif bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dengan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor, seperti perikanan, konservasi, dan pelayaran guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip internasional (Triyani et al., 2025). Kajian komprehensif terkini menegaskan bahwa tantangan pengelolaan berbasis ekosistem laut tetap ada, meskipun sejumlah solusi telah tersedia dan kemajuan terus terjadi (Haugen et al., 2024).

Keterkaitan antara MSP, ekonomi biru, dan *Sustainable Development Goal* (SDG) 14 semakin ditegaskan dalam literatur kebijakan kelautan kontemporer. MSP dipandang sebagai instrumen penghubung antara SDG 14 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, karena kemampuannya mengintegrasikan pertimbangan ekologis, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka perencanaan (Ntona & Morgera, 2018). Dalam konteks ekonomi biru, tata kelola ruang laut yang baik menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang berkeadilan (Cisneros-Montemayor et al., 2021). Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh identifikasi sepuluh risiko utama dalam pertumbuhan ekonomi biru beserta solusi yang berorientasi pada keadilan kelautan (Bennett et al., 2021). Adapun ekonomi biru sendiri didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan guna memperoleh manfaat ekonomi dengan prinsip efisiensi sumber daya dan konservasi ekosistem (Atmadi et al., 2026).

Di kawasan Asia Tenggara, dinamika pemanfaatan ruang laut memiliki karakteristik khas akibat tingginya keanekaragaman hayati laut, kepadatan penduduk pesisir, serta posisi geostrategis ASEAN sebagai jalur pelayaran dan sumber daya perikanan global. Kawasan ini memerlukan prioritas iklim yang mendesak melalui pengelolaan karbon biru yang mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi dan lingkungan secara saling terkait. Persoalan ini diperparah oleh tingginya volume pencemaran plastik laut yang membutuhkan riset dan kebijakan terarah, sebagaimana ditegaskan dalam prioritas riset pencemaran plastik laut di Asia Tenggara yang menekankan perlunya pendekatan lintas disiplin (Omeyer et al., 2022). Sementara itu, kajian bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengelolaan kawasan pesisir terpadu terus berkembang, meskipun distribusinya belum merata secara geografis (L. Jiang et al., 2023).

Ekonomi biru di kawasan ASEAN menunjukkan perkembangan yang beragam antarnegara, dengan Indonesia menempati posisi strategis sebagai negara kepulauan terbesar. Dalam konteks nasional, capaian ekonomi biru tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya kelautan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan dan arah kebijakan pembangunan (Marwa et al., 2024). Namun, hingga kini orientasi pembangunan nasional masih cenderung berfokus pada pembangunan berbasis daratan, sehingga ruang laut lebih sering diposisikan sebagai objek eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, serta ruang yang rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh implementasi kebijakan pembangunan maritim

yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh (Darmawan et al., 2022). Di tingkat regional, komitmen Indonesia melalui kepemimpinannya di ASEAN dalam mendorong praktik perikanan berkelanjutan semakin menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antarnegara anggota sebagai prasyarat penguatan ekonomi biru kawasan (Sabrina & Putra, 2025).

Pada level yang lebih mendasar, partisipasi dan representasi pemangku kepentingan dalam proses MSP masih menjadi persoalan tersendiri. Flannery et al. (2018) menemukan bahwa eksklusi dan ketiadaan partisipasi dalam perencanaan ruang laut merupakan persoalan yang berulang, di mana kelompok masyarakat pesisir kerap tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Kritik struktural terhadap MSP bahkan menyoroti MSP berisiko hanya menjadi wadah baru yang mengemas ulang relasi kuasa lama dalam bahasa partisipasi, sehingga legitimasi kebijakan tetap lebih banyak menguntungkan aktor-aktor dominan daripada kelompok pesisir dan publik yang lebih luas.

Studi kasus negara ASEAN secara spesifik memperlihatkan variasi pendekatan tata kelola. Di Filipina, Satizábal et al. (2020) menunjukkan bagaimana ruang laut dikonfigurasi ulang melalui wacana dan praktik ekonomi biru yang sarat kepentingan politik-ekonomi. Di kawasan yang lebih luas, Chen et al. (2024) memetakan pola perlindungan dan mekanisme pendorong ekosistem laut khas di kawasan Tiongkok-ASEAN, yang memperlihatkan variasi tingkat perlindungan antarwilayah. Bibliometrik terhadap partisipasi komunitas dalam kawasan lindung laut oleh Jiang et al. (2024) turut menegaskan tren global menuju tata kelola partisipatif. Sementara itu, kerentanan pesisir di Asia Tenggara turut menjadi perhatian, Noor dan Abdul Maulud (2022) menegaskan perlunya asesmen kerentanan pesisir yang terintegrasi di kawasan ini mengingat tingginya paparan terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan: sebagian besar kajian tata kelola ruang laut ASEAN masih bersifat studi kasus tunggal per negara (Satizábal et al, 2020 ; Marwa et al. (2024), sedangkan sintesis komparatif lintas negara ASEAN yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, MSP, ekonomi biru, dan keamanan maritim secara terintegrasi masih terbatas (Haugen et al., 2024). Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui Systematic Literature Review berbasis PRISMA 2020 untuk menyintesis bukti tata kelola pemanfaatan ruang laut di negara-negara ASEAN serta merumuskan model konseptual ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework (AIMSGF). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik tata kelola ruang laut ASEAN guna merumuskan rekomendasi berbasis bukti bagi penguatan tata kelola ruang laut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020. Pemilihan PRISMA 2020 didasarkan pada kebutuhan akan transparansi dan replikabilitas proses seleksi literatur, sebagaimana lazim digunakan dalam kajian tata kelola kelautan kontemporer yang bersifat multidisipliner, termasuk kajian bibliometrik pengelolaan pesisir terpadu (Jiang et al., 2023) dan kajian bibliometrik partisipasi komunitas dalam kawasan lindung laut (Jiang et al., 2024).

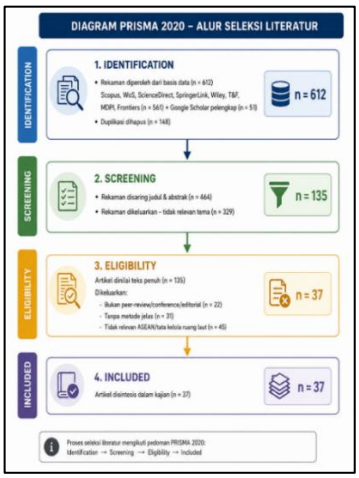
Penelusuran literatur dilakukan pada sembilan sumber basis data, yaitu Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online, MDPI, Frontiers, dan Google Scholar. Rentang tahun publikasi dibatasi pada 2015–2026 untuk menangkap perkembangan MSP pasca-adopsi Agenda 2030 dan SDG 14. Strategi pencarian menggunakan kombinasi Boolean dari istilah inti dan istilah geografis, yaitu: ("Marine Spatial Planning" OR "Maritime Spatial Planning" OR "Marine Governance" OR "Ocean Governance"

OR "Marine Policy" OR "Marine Space Utilization" OR "Blue Economy" OR "Coastal Governance" OR "Integrated Coastal Zone Management") AND ("ASEAN" OR "Indonesia" OR "Malaysia" OR "Singapore" OR "Thailand" OR "Vietnam" OR "Philippines" OR "Brunei" OR "Cambodia" OR "Myanmar"). Kombinasi kata kunci ini mengacu pada terminologi kunci yang digunakan dalam literatur tata kelola ruang laut global (Long et al., 2015) maupun literatur ekonomi biru kawasan (Cisneros-Montemayor et al., 2021).

Kriteria Inklusi dan Eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: artikel *peer-reviewed*; diprioritaskan kuartil Q1–Q3 Scopus/SJR tersedia dalam teks penuh; membahas tata kelola ruang laut secara substantif; memiliki relevansi langsung atau komparatif dengan kawasan ASEAN; dan memiliki metode penelitian yang jelas, mengikuti standar seleksi yang diterapkan pada kajian tinjauan sistematik serupa di bidang pengelolaan pesisir. Kriteria eksklusi meliputi: *conference paper, editorial, book review, opinion paper*, artikel tanpa teks penuh, serta artikel yang tidak membahas tata kelola ruang laut secara substantif.

Adapun Proses Seleksi (Tahapan PRISMA 2020) sebagai berikut:

1. Identification. Pada tahap ini dilakukan penelusuran awal di seluruh basis data menggunakan kombinasi kata kunci di atas, menghasilkan sejumlah rekaman awal yang kemudian digabungkan lintas basis data. Duplikasi antarbasis data diidentifikasi dan dihapus menggunakan pencocokan judul, penulis, dan DOI, sebagaimana prosedur identifikasi yang lazim diterapkan pada tinjauan sistematik pengelolaan zona pesisir (Jiang et al., 2023).
2. Screening. Rekaman yang tersisa disaring berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai relevansi tematik terhadap tata kelola ruang laut dan konteks ASEAN. Artikel yang secara jelas tidak relevan (misalnya kajian biologi kelautan murni tanpa dimensi tata kelola) dikeluarkan pada tahap ini, mengikuti pendekatan penapisan tematik yang diterapkan pada kajian prioritas riset pencemaran plastik laut di Asia Tenggara (Omeyer et al., 2022).
3. Eligibility. Artikel yang lolos tahap penyaringan dinilai kelayakannya melalui pembacaan teks penuh, dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat. Artikel yang tidak memiliki metode penelitian yang jelas atau tidak membahas tata kelola ruang laut secara substantif dikeluarkan pada tahap ini, disertai pencatatan alasan eksklusi, sejalan dengan praktik evaluasi kelayakan pada kajian bibliometrik ICZM di Turki (Satiroğlu, 2024).
4. Included. Artikel yang memenuhi seluruh kriteria kelayakan dimasukkan ke dalam sintesis akhir sebagai korpus data penelitian. Diagram alur seleksi disajikan pada Gambar 1.
5.



Gambar 1. Proses Seleksi Literatur menggunakan Prisma 2020

Adapun data tersebut kemudian diekstraksi menggunakan matriks standar meliputi penulis, tahun, negara fokus, metode, topik, dan temuan utama sebagaimana akan dijelaskan dalam Tabel 1. Sintesis dilakukan secara tematik (*thematic synthesis*) dengan mengelompokkan temuan ke dalam kategori: regulasi, kelembagaan, MSP, ekonomi biru, konflik pemanfaatan ruang, partisipasi pemangku kepentingan, dan keamanan maritim, mengikuti kerangka sintesis tematik yang diadaptasi dari pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem (Long et al, 2015 ; Haugen et al, 2024). Kategori ini kemudian dibandingkan lintas negara ASEAN untuk menghasilkan sintesis komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Artikel Terpilih

Dari 37 artikel yang lolos tahap *included* dalam proses seleksi PRISMA 2020, dilakukan ekstraksi data untuk memetakan karakteristik masing-masing artikel berdasarkan penulis, negara/kawasan fokus, metode penelitian, topik kajian, dan temuan utama, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Artikel Terpilih

Penulis (Tahun)	Negara/Kawasan	Metode	Topik	Temuan Utama
Long et al. (2015)	Global	Konseptual	Prinsip *Ecosystem-Based Management (*EBM) laut	Merumuskan prinsip kunci pengelolaan berbasis ekosistem laut
(Ntona dan Morgera, 2018)	Global/SDGs	Analisis kebijakan	Marine Spatial Planning (MSP) & *Sustainable Development Goals (SDGs)* 14	MSP sebagai penghubung SDG 14 dengan tujuan SDGs lain
Tafon (2018)	Global	Teori Kritits	Kekuasaan dalam MSP	MSP tidak netral dan sarat relasi kekuasaan
Flannery et al. (2018)	Eropa (komparatif)	Studi kasus	Partisipasi MSP	Eksklusi kelompok masyarakat dalam proses MSP
Nagabhatla et al. (2019)	Asia Tenggara	Konseptual	Integrated Coastal Zone Management (ICZM) & kapasitas	Pendekatan EBM untuk riset dan kapasitas ICZM Asia Tenggara
Bellanger et al. (2020)	Global	Tinjauan kebijakan	Konflik tata kelola pesisir	Konflik lintas sektor & yurisdiksi memerlukan koordinasi
Roy (2020)	Asia	Tinjauan	Ocean Governance	Kerangka kebijakan laut masih terfragmentasi
Satizábal et al. (2020)	Filipina	Studi kasus/diskursus	Ekonomi biru	Rekonfigurasi ruang menjadi wacana ekonomi biru
Grip & Blomqvist (2020)	Eropa	Tinjauan	Konservasi dengan perikanan	Konflik konservasi laut dengan sektor perikanan
Hammar et al. (2020)	Eropa	Metodologis	Dampak kumulatif MSP	Kerangka asesmen dampak kumulatif untuk MSP berbasis ekosistem
Kriegl et al. (2021)	Global	Tinjauan	Marine Protected Area (MPA) dengan perikanan	Kawasan lindung laut di persimpangan konservasi-perikanan
Cisneros-Montemayor et al. (2021)	Global	Tinjauan	Ekonomi biru berkeadilan	Kondisi pemungkin untuk ekonomi biru yang adil
Bennett et al.,	Global	Konseptual	Risiko *blue growth*	Sepuluh risiko dan solusi

Penulis (Tahun)	Negara/Kawasan	Metode	Topik	Temuan Utama
(2021)				ekonomi biru berkeadilan
Benzaken et al. (2022)	Afrika timur	Studi kasus	Tata kelola pulau kecil	Pelajaran tata kelola ekonomi biru berkelanjutan
Omeyer et al. (2022)	Asia Tenggara	Tinjauan prioritas riset	Pencemaran plastik laut	Prioritas riset lintas disiplin kebijakan-lingkungan
Sarangi (2022)	Global	Konseptual	Blue Finance & Governance	Keterkaitan ekonomi biru, keuangan biru dan SDGs
Boussarie et al. (2023)	Eropa	Kuantitatif spasial	Konflik MSP	Prioritisasi ruang laut untuk energi angin & MPA
Jiang et al. (2023)	Global	Bibliometrik	ICZM	Tren riset ICZM dari masa lalu ke masa depan
Saengsupavanich et al. (2023)	Thailand, Malaysia, Sri Lanka	Studi kasus	Abrasi pesisir	Tantangan pengelolaan erosi pesisir Asia Selatan-Tenggara
Shampa et al. (2023)	Bangladesh	Tinjauan komprehensif	ICZM	Status dan arah pengelolaan pesisir berkelanjutan
Marwa et al. (2024)	Indonesia	Kuantitatif	Determinan ekonomi biru	Faktor kelembagaan memengaruhi pertumbuhan ekonomi biru
Chen et al. (2024)	Tiongkok-ASEAN	Studi kasus spasial	Ekosistem laut	Pola perlindungan ekosistem laut khas kawasan
Jiang et al. (2024)	Global	Bibliometrik	Partisipasi MPA	Tren partisipasi komunitas dalam MPA
Das et al. (2024)	Bangladesh	Kualitatif	Jaringan tata kelola	Persepsi pemangku kepentingan & implikasi keadilan
Haugen et al. (2024)	Global	Tinjauan	EBM laut	Tantangan tetap ada namun solusi & kemajuan tersedia
Noor dan Abdul Maulud (2022)	Asia Tenggara	Tinjauan	Kerentanan pesisir	Perlunya asesmen terintegrasi kerentanan pesisir
Becker et al. (2025)	Asia Tenggara	Tinjauan Kebijakan	Karbon Biru	Integrasi sosial-ekonomo-lingkungan dalam karbon biru
Galparsoro et al. (2025)	Global	Metodologis	EBM dalam MSP	Instrumen asesmen implementasi prinsip EBM dalam MSP
Rafiq et al.(2025)	Asia Tenggara	Panel-ARDL	Investasi ekonomi biru	Investasi dan inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi biru
Sabrina dan Putra (2025)	Indonesia/ASEAN	Analisis kebijakan	Perikanan berkelanjutan	Upaya regional Indonesia di ASEAN untuk perikanan
Saraswati et al. (2025)	Indonesia/ASEAN	Analisis hukum	Presidensi ASEAN	Peran hukum Indonesia dalam mendorong

Penulis (Tahun)	Negara/Kawasan	Metode	Topik	Temuan Utama
				ekonomi biru ASEAN
Borges et al. (2025)	Kuba	Studi kasus	Tata kelola sosio-ekosistem	Kerangka kelembagaan pendekatan sosio-ekosistem
Yang et al. (2026)	Global	Konseptual	MSP & ekonomi biru	Kerangka MSP untuk pembangunan berkelanjutan
Vázquez-Pinillos et al. (2023)	Chili	Studi kasus	Delimitasi zona pesisir	Metode delimitasi zona pesisir terpadu
Li et al. (2026)	Tiongkok	Tinjauan historis	ICZM	Evolusi ICZM Tiongkok sejak 1950-an
Zhang et al. (2024)	Tiongkok	Analisis hukum	Tata kelola kota pesisir	Perspektif SDGs dalam hukum lingkungan internasional
Satiroğlu (2024)	Turki	Bibliometrik	ICZM	Evaluasi bibliometrik studi ICZM dalam konteks SDGs

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, komposisi artikel terpilih didominasi oleh kajian konseptual dan tinjauan kebijakan (Long et al, 2015; Haugen et al, 2024), diikuti oleh studi kasus negara tunggal (Satizábal et al, 2020; Marwa et al, 2024) dan kajian bibliometrik (Jiang et al, 2023; Jiang et al, 2024). Pola ini mengonfirmasi kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian Pendahuluan, yaitu minimnya kajian komparatif lintas negara ASEAN yang membandingkan tata kelola ruang laut secara sistematis.

Perbandingan Tata Kelola Antarnegara ASEAN

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai persamaan dan perbedaan tata kelola ruang laut antarnegara ASEAN, temuan dari artikel terpilih disintesis dan dibandingkan pada enam dimensi kunci antara lain: regulasi, institusi, *marine spatial planning*, ekonomi biru, konflik pemanfaatan, dan partisipasi pemangku kepentingan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Tata Kelola Ruang Laut Negara ASEAN

Negara	Regulasi	Institusi	Marine Spatial Planning	Ekonomi Biru	Konflik Pemanfaatan	Partisipasi Pemangku Kepentingan
Indonesia	UU Kelautan, RZWP-3-K	KKP	Berkembang, terdesentralisasi	Berkembang, dipengaruhi faktor kelembagaan	Tumpang tindih izin lintas sektor & daerah	Terbatas
Malaysia	Kerangka pesisir federal-negara bagian	Badan Kelautan Nasional	Terfragmentasi antarnegara bagian	Berkembang moderat	Konflik federal–negara bagian	Moderat
Singapura	Regulasi maritim terpusat	Otoritas Maritim & Pelabuhan tunggal	Terintegrasi tinggi	Maju, jasa maritim & logistik	Relatif rendah	Rendah, sentralisasi keputusan
Thailand	Kerangka kelautan & lingkungan pesisir	Kementerian SDA & Lingkungan	Berkembang, fokus pariwisata-konservasi	Berkembang, pariwisata bahari	Konflik pariwisata vs konservasi	Moderat
Vietnam	Strategi	Kementerian	Terintegrasi	Maju,	Konflik	Moderat–

Negara	Regulasi	Institusi	Marine Spatial Planning	Ekonomi Biru	Konflik Pemanfaatan	Partisipasi Pemangku Kepentingan
	Ekonomi Laut Berkelanjutan Nasional	SDA & Lingkungan	dengan strategi nasional	prioritas kebijakan nasional	akuakultur vs pelayaran vs energi lepas pantai	tinggi
Filipina	UU Perikanan, kebijakan ekonomi biru berkembang	Departemen Pertanian, BFAR	Terfragmentasi, berbasis kepulauan	Berkembang, diwarnai rekonfigurasi ruang laut	Tinggi, akibat struktur kepulauan	Tinggi pada level komunitas lokal
Brunei Darussalam	Regulasi kelautan terbatas	Kementerian Sumber Daya Primer	Belum formal	Terbatas, dominasi migas	Rendah	Rendah
kamboja & Myanmar	Kerangka kelautan minim	Institusi lemah	Belum ada MSP formal	Sangat terbatas	Data terbatas dalam literatur	Sangat terbatas

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh negara ASEAN menghadapi tantangan yang serupa dalam bentuk fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah/negara bagian, sebagaimana tercermin pada kasus Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Persoalan tata kelola laut dan pesisir pada dasarnya berakar pada koordinasi lintas sektor dan yurisdiksi yang tumpang tindih (Bellanger et al., 2020), dan pola ini berulang di berbagai negara ASEAN berstruktur kepulauan atau federal (Satizábal et al, 2020; Marwa et al, 2024). Namun demikian, tingkat sentralisasi kelembagaan menghasilkan perbedaan signifikan dalam efektivitas implementasi: Singapura, dengan struktur otoritas maritim tunggal, menunjukkan efisiensi tata kelola yang tinggi karena minimnya tumpang tindih kewenangan, berbeda dengan Indonesia dan Filipina yang berhadapan dengan kompleksitas desentralisasi kepulauan.

Dari sisi implementasi MSP, Vietnam menunjukkan kemajuan melalui strategi ekonomi laut nasional yang koheren, sedangkan Indonesia masih berada pada tahap pengembangan RZWP-3-K yang implementasinya belum merata antarprovinsi (Marwa et al., 2024). Instrumen asesmen implementasi prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dalam proses MSP yang dikembangkan oleh Galparsoro et al. (2025) menjadi relevan untuk mengevaluasi kesenjangan implementasi semacam ini, karena banyak negara ASEAN telah memiliki kerangka regulasi namun belum diikuti oleh kapasitas teknis dan data spasial yang memadai. Tantangan dampak kumulatif dari berbagai aktivitas laut turut menjadi perhatian; Hammar et al. (2020) menegaskan pentingnya mempertimbangkan efek gabungan berbagai aktivitas laut, bukan menilai sektor secara terpisah, pendekatan yang belum diadopsi secara konsisten di sebagian besar negara ASEAN.

Praktik Terbaik dalam Tata Kelola Ruang Laut

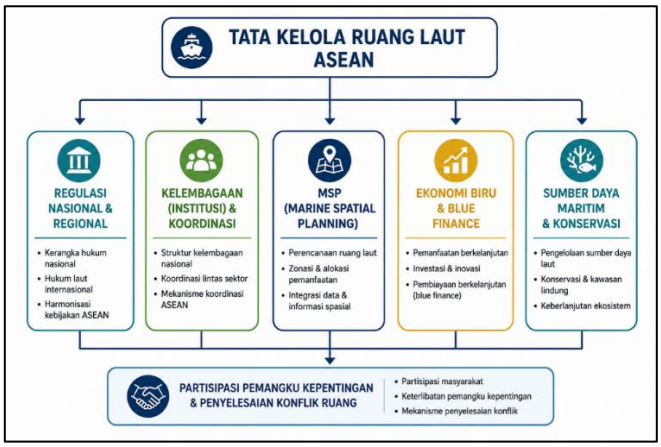
Berdasarkan sintesis pada Tabel 2, empat negara yakni: Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina teridentifikasi memiliki praktik tata kelola ruang laut yang relatif menonjol dan berpotensi menjadi rujukan pembelajaran bagi Indonesia, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Praktik Terbaik (*Best Practices*) Tata Kelola Ruang Laut ASEAN

Negara	Keunggulan	Kelemahan	Pelajaran bagi Indonesia
Singapura	Otoritas maritim tunggal, integrasi data spasial tinggi	Skala wilayah kecil, sulit direplikasi	Penyederhanaan kelembagaan lintas sektor

Negara	Keunggulan	Kelemahan	Pelajaran bagi Indonesia
Vietnam	Strategi ekonomi laut nasional koheren	Kapasitas penegakan di wilayah terpencil lemah	Pentingnya visi kebijakan laut jangka panjang
Thailand	Integrasi pariwisata-konservasi berbasis komunitas	Tumpang tindih kewenangan pusat-daerah	Model kolaborasi konservasi-pariwisata
Filipina	Partisipasi komunitas lokal kuat	Fragmentasi antarkepulauan	Penguatan pengelolaan berbasis kepulauan

Koordinasi kelembagaan menjadi titik lemah yang konsisten ditemukan pada negara-negara berstruktur *multi-level governance* seperti Indonesia dan Malaysia. Konflik pemanfaatan ruang laut antara sektor konservasi dan sektor produktif juga bersifat universal; kawasan lindung laut secara konsisten berada pada titik temu yang tegang antara kepentingan konservasi alam dan pengelolaan perikanan (Kriegl et al, 2021;Grip & Blomqvist, 2020). Pendekatan spasial kuantitatif menawarkan solusi teknokratis, sebagaimana ditunjukkan oleh (Boussarie et al., 2023) bahwa perencanaan ruang laut yang memprioritaskan lokasi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dan kawasan lindung laut dapat memitigasi konflik semacam ini. Pendekatan berbasis data seperti ini belum banyak diterapkan di ASEAN, yang cenderung menyelesaikan konflik ruang laut secara *ad hoc* melalui negosiasi administratif ketimbang model spasial berbasis bukti (Saengsupavanich et al., 2023). Sebagai ilustrasi struktur relasi antarelemen tata kelola yang teridentifikasi dari sintesis Tabel 2 dan Tabel 3, Gambar 2 menyajikan peta konsep tata kelola ruang laut ASEAN.



Gambar 2. Peta Konsep Tata Kelola Ruang Laut ASEAN

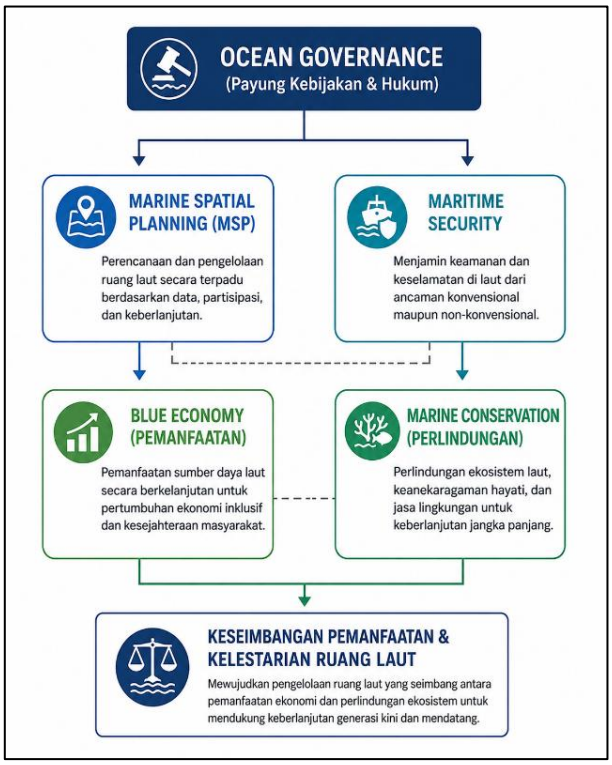
Peta konsep pada Gambar 2 disusun berdasarkan sintesis lima dimensi utama yang berulang ditemukan dalam literatur terpilih yakni: regulasi, kelembagaan, MSP, ekonomi biru dan sumber daya maritim-konservasi.

Faktor Hukum, Kelembagaan, Politik dan Sosial

Dari sisi hukum, kerangka regulasi ASEAN masih bersifat nasional-sentris tanpa instrumen hukum kawasan yang mengikat secara spesifik untuk tata kelola ruang laut. Saraswati et al, (2025) menyoroti peran hukum Indonesia sebagai presidensi ASEAN dan penggerak ekonomi biru sebagai upaya mendorong harmonisasi tersebut, namun harmonisasi penuh masih jauh dari tercapai. Dari sisi kelembagaan, kapasitas antarnegara sangat timpang, Singapura dan Vietnam relatif kuat, sementara Kamboja dan Myanmar masih dalam tahap pembangunan kapasitas dasar. Dari sisi politik, kepentingan nasional dan kedaulatan maritim kerap menghambat harmonisasi kebijakan regional. MSP sarat relasi kekuasaan dan tidak dapat dipandang sebagai proses teknokratis yang

netral. Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat pesisir masih rendah di banyak negara, (Flannery et al., 2018) menemukan bahwa eksklusi kelompok masyarakat pesisir dari proses pengambilan keputusan MSP merupakan persoalan yang berulang secara global sebuah pola yang juga terlihat kuat di Indonesia dan Malaysia dibandingkan Filipina yang relatif lebih partisipatif pada level komunitas lokal (Jiang et al., 2024) dan (Satizábal et al., 2020).

Sebagai penutup subbab ini, Gambar 3 mengilustrasikan hubungan konseptual antara MSP, ekonomi biru, *ocean governance*, konservasi laut, dan keamanan maritim yang menjadi dasar sintesis di atas.



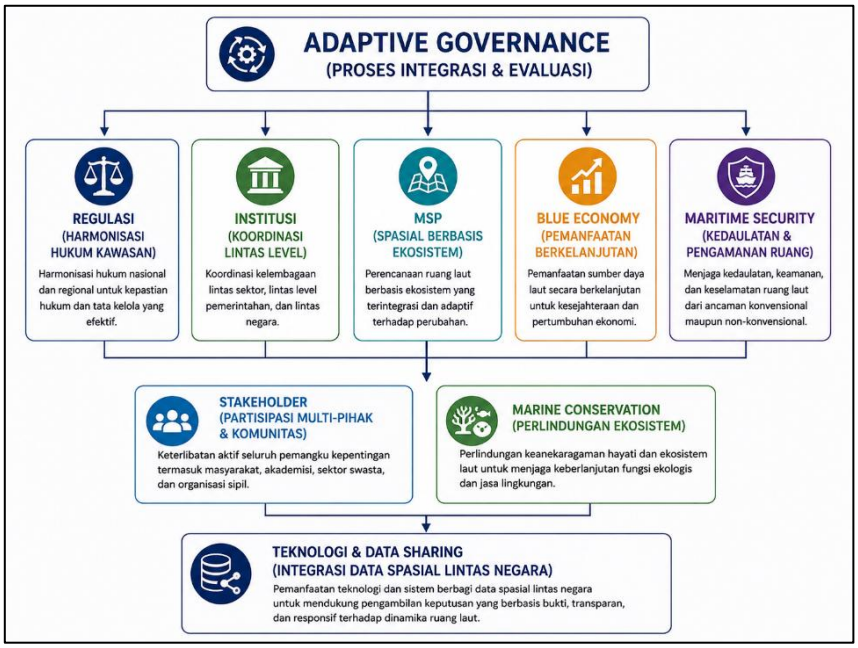
Gambar 3. Diagram Hubungan MSP, Blue Economy, Ocean Governance, Marine Conservation, dan Maritime Security

Diagram pada Gambar 3 menegaskan bahwa *ocean governance* berfungsi sebagai payung kebijakan yang menaungi MSP dan keamanan maritim (Ntona & Morgera, 2018), yang pada gilirannya memengaruhi keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi biru dan perlindungan ekosistem laut (Bennett et al, 2021; Kriegl et al, 2021). Sebagaimana ditegaskan oleh (Haugen et al., 2024) bahwa tantangan struktural dalam pengelolaan berbasis ekosistem laut tetap ada meskipun solusi dan kemajuan terus berkembang, sehingga diperlukan kerangka tata kelola yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen tersebut secara koheren kebutuhan inilah yang menjadi dasar perumusan model AIMSGF.

Model Konseptual: ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework (AIMSGF)

Berdasarkan sintesis di atas, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual baru bernama ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework (AIMSGF). Model ini dibangun atas sepuluh dimensi yang saling terhubung: Regulasi, Institusi, *Marine Spatial Planning*, *Blue Economy*, *Stakeholder*, Teknologi, *Data Sharing*, *Maritime Security*, *Marine Conservation*, dan *Adaptive Governance*. AIMSGF diposisikan sebagai kerangka adaptif bukan model linier karena

mempertimbangkan variasi kapasitas kelembagaan antarnegara ASEAN.



Gambar 4. Diagram Konseptual AIMSGF

Dimensi *Regulasi* dan *Institusi* menjadi fondasi struktural yang menjamin kepastian hukum dan koordinasi lintas sektor, merujuk pada kebutuhan mengatasi konflik yurisdiksi yang menjadi sumber persoalan tata kelola laut dan pesisir (Bellanger et al., 2020). Dimensi *MSP* berfungsi sebagai instrumen teknis alokasi ruang berbasis ekosistem sesuai prinsip kunci pengelolaan berbasis ekosistem laut (Long et al., 2015), sementara dimensi *Blue Economy* diarahkan agar tumbuh secara inklusif sejalan dengan kondisi pemungkin bagi ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan (Cisneros-Montemayor et al., 2021). Dimensi *Stakeholder* menjawab persoalan eksklusi partisipasi yang kerap ditemukan dalam proses MSP konvensional (Flannery et al., 2018), sedangkan dimensi *Teknologi dan Data Sharing* menjawab kebutuhan integrasi data spasial lintas negara ASEAN yang saat ini masih terfragmentasi. Dimensi *Maritime Security* dan *Marine Conservation* ditempatkan sejajar untuk menegaskan bahwa keamanan maritim dan konservasi laut bukan dua agenda yang terpisah, melainkan saling menopang dalam menjaga keberlanjutan ruang laut (Kriegl et al., 2021). Seluruh dimensi disatukan oleh *Adaptive Governance* sebagai mekanisme evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, mengingat tantangan pengelolaan berbasis ekosistem laut tetap ada meskipun kemajuan terus terjadi (Haugen et al., 2024), sehingga dibutuhkan mekanisme pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis dan model AIMSGF, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan bagi Indonesia:

1. Penyempurnaan regulasi: mempercepat harmonisasi RZWP-3-K dengan kebijakan sektoral nasional agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan ruang laut antarsektor dan antardaerah (Bellanger et al., 2020)

2. Implementasi MSP berbasis data: mengadopsi pendekatan asesmen dampak kumulatif dan prioritisasi spasial berbasis bukti, sebagaimana ditunjukkan oleh (Boussarie et al, 2023; Hammar et al, 2020), untuk mengurangi konflik ruang laut antarsektor di Indonesia.
3. Integrasi ekonomi biru: mengarahkan investasi ekonomi biru agar inklusif dan tidak memperbesar ketimpangan, sejalan dengan prinsip kondisi pemungkin ekonomi biru yang berkeadilan (Cisneros-Montemayor et al, 2021; Bennett et al, 2021).
4. Penguatan koordinasi lintas sektor: membangun basis data spasial laut nasional yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga sebagai fondasi teknis bagi implementasi AIMSGF di tingkat nasional (Galparsoro et al., 2025).
5. Harmonisasi kebijakan tingkat ASEAN: mendorong penyusunan kerangka kerja sama MSP regional ASEAN melalui forum sektoral kelautan ASEAN, memanfaatkan momentum peran Indonesia sebagai presidensi dan penggerak ekonomi biru kawasan (Saraswati et al, 2025; Sabrina dan Putra, 2025).
6.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyintesis literatur ilmiah mengenai tata kelola pemanfaatan ruang laut di negara-negara ASEAN melalui pendekatan *Systematic Literature Review* berbasis PRISMA 2020. Terhadap rumusan masalah pertama, hasil kajian menunjukkan bahwa pola tata kelola ruang laut ASEAN bervariasi signifikan, mulai dari model tersentralisasi dan efisien seperti Singapura, model strategis-nasional seperti Vietnam, hingga model terdesentralisasi dan kompleks seperti Indonesia dan Filipina. Terhadap rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa seluruh negara ASEAN menghadapi persoalan serupa berupa fragmentasi kewenangan lintas sektor dan yurisdiksi, keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan, serta ketegangan antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan ekonomi, sementara faktor keberhasilan yang teridentifikasi meliputi koherensi strategi nasional, kapasitas kelembagaan yang terkonsolidasi, dan integrasi data spasial. Terhadap rumusan masalah ketiga, penelitian ini merumuskan model *ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework* (AIMSGF) sebagai kerangka tata kelola adaptif yang mengintegrasikan sepuluh dimensi antara lain: regulasi, institusi, MSP, ekonomi biru, pemangku kepentingan, teknologi, *data sharing*, keamanan maritim, konservasi laut, dan tata kelola adaptif sebagai rekomendasi model bagi Indonesia dan kawasan ASEAN secara lebih luas.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada sintesis komparatif lintas negara ASEAN yang belum banyak dilakukan secara sistematis dalam literatur sebelumnya, serta pengintegrasian dimensi keamanan maritim ke dalam kerangka tata kelola ruang laut yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ekologi dan ekonomi semata. Implikasi kebijakan yang dihasilkan relevan bagi penguatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi harmonisasi kebijakan tata kelola ruang laut di tingkat kawasan ASEAN.

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan validasi empiris terhadap model AIMSGF melalui studi kasus mendalam pada satu atau beberapa provinsi di Indonesia, serta melakukan kajian kuantitatif untuk mengukur korelasi antara kapasitas kelembagaan dan efektivitas implementasi MSP di negara-negara ASEAN. Penelitian mendatang juga disarankan memperluas cakupan literatur pada negara-negara ASEAN yang masih kurang terwakili dalam literatur akademik, yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar, guna menghasilkan gambaran tata kelola ruang laut ASEAN yang lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR REFERENSI

Atmadi, Muhammad Yusuf Al Habsy, Bakar, A. N., Traiyarach, S., Surjaatmadja, S., & Christina,

A. (2026). The development of blue economy research in Indonesia: A systematic literature review and future research directions. *Journal of Geospatial Science and Analytics*, 2(1), 51-60. https://doi.org/10.58524/jgsa.v2i1.134

Becker, A., Bercovici, S. K., Choo, J., Fakhrurrozi, F., Fong, A., Fowell, S. E., Hossain, E., Hussein, M., Jamilah, M., Mujahid, A., Müller, M., Ooi, J., Quiros, T. L., Richard, F., Saleh, E., Chee, S. Y., Then, A., Ticman, K., Wee, J. L. S., . . . Evans, C. (2025). Blue carbon management integrating socioeconomic and environmental interconnectivity in Southeast Asia: an urgent climate priority. *Frontiers in Marine Science*. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1642387

Bellanger, M., Speir, C., Blanchard, F., Brooks, K., Butler, J. R. A., Crosson, S., Fonner, R., Gourguet, S., Holland, D. S., Kuikka, S., Le Gallic, B., Lent, R., Libecap, G. D., Lipton, D. W., Nayak, P. K., Reid, D., Scemama, P., Stephenson, R., Thébaud, O., & Young, J. C. (2020). Addressing Marine and Coastal Governance Conflicts at the Interface of Multiple Sectors and Jurisdictions. In *Frontiers in Marine Science* (Vol. 7). Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.544440

Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, *125*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387

Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. *Frontiers in Political Science*. https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318

Borges, R. A. Y., Pérez Montero, O. P., Barragán Muñoz, J. M., & Milanés, C. B. (2025). Institutional frameworks and strategies for implementing the socio-ecosystemic approach to coastal marine governance in Cuba. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17114770

Boussarie, G., Kopp, D., Lavialle, G., Mouchet, M., & Morfin, M. (2023). Marine spatial planning to solve increasing conflicts at sea: A framework for prioritizing offshore windfarms and marine protected areas. *Journal of Environmental Management*, *339*. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117857

Chen, F., Cui, Z., Wu, J., Jiang, Y., & Cai, F. (2024). Protection pattern and driving mechanism of typical marine ecosystems: a case study of China-ASEAN countries. *Frontiers in Marine Science*, *11*. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1378188

Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Reygondeau, G., Cheung, W. W. L., Crosman, K. M., González-Espinosa, P. C., Lam, V. W. Y., Oyinlola, M. A., Singh, G. G., Swartz, W., Zheng, C. wei, & Ota, Y. (2021). Enabling conditions for an equitable and sustainable blue economy. *Nature*, *591*(7850), 396–401. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03327-3

Cuadrado Quesada, G., Klenke, T., & Mejía-Ortíz, L. (2018). Regulatory challenges in realizing integrated coastal management—Lessons from Germany, Costa Rica, Mexico and South Africa. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su10103772

Darmawan, C., Rudiyanto, R., & Yulianto, B. (2022). A Reconceptualization of Marine Security Institutions to Make Indonesia Become a Maritime Axis Country. *JESS (Journal Of Education On Social Science), 6*(1), 53-61. https://doi.org/10.24036/jess.v6i1.395

Das, J., Govender, M., Irfanullah, H. M., Selim, S. A., & Glaser, M. (2024). Stakeholder perceptions of blue economy governance networks and their equity implications in Bangladesh. *Marine Policy*, *170*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106359

Flannery, W., Healy, N., & Luna, M. (2018). Exclusion and non-participation in Marine Spatial Planning. *Marine Policy*, *88*, 32–40. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.001

Galparsoro, I., Montero, N., Mandiola, G., Menchaca, I., Borja, Á., Flannery, W., Katsanevakis, S., Fraschetti, S., Fabbrizzi, E., Elliott, M., Bas, M., Barnard, S., Piet, G. J., Giakoumi, S., Kruse, M., McAteer, B., Runya, R. M., Lukyanova, O., Morato, T., … Stelzenmüller, V. (2025). Assessment tool addresses implementation challenges of ecosystem-based management principles in marine spatial planning processes. *Communications Earth and Environment*, *6*(1). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01975-7

Grip, K., & Blomqvist, S. (2020). Marine nature conservation and conflicts with fisheries. In *Ambio* (Vol. 49, Number 7, pp. 1328–1340). Springer. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01279-7

Hammar, L., Molander, S., Pålsson, J., Schmidtbauer Crona, J., Carneiro, G., Johansson, T., Hume, D., Kågesten, G., Mattsson, D., Törnqvist, O., Zillén, L., Mattsson, M., Bergström, U., Perry, D., Caldow, C., & Andersen, J. H. (2020). Cumulative impact assessment for ecosystem-based marine spatial planning. *Science of the Total Environment*, *734*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139024

Haugen, J. B., Link, J. S., Cribari, K., Bundy, A., Dickey-Collas, M., Leslie, H. M., Hall, J., Fulton, E. A., Levenson, J. J., Parsons, D. M., Hassellöv, I. M., Olsen, E., DePiper, G. S., Gentry, R. R., Clark, D. E., Brainard, R. E., Mateos-Molina, D., Borja, A., Gelcich, S., … Agnalt, A. L. (2024). Marine ecosystem-based management: challenges remain, yet solutions exist, and progress is occurring. *NPJ Ocean Sustainability*, *3*(1). https://doi.org/10.1038/s44183-024-00041-1

Jiang, L., Yang, T., Wang, X., Yu, J., Liu, J., & Zhang, K. (2023). Research on integrated coastal zone management from past to the future: a bibliometric analysis. In *Frontiers in Marine Science* (Vol. 10). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1201811

Jiang, X., Liu, F., Yu, J., Zhang, K., Zhang, Z., & Wang, Q. (2024). Global Trends and Prospects of Community Participation in Marine Protected Areas: A Bibliometric Analysis. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Number 17). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/su16177772

Kriegl, M., Elías Ilosvay, X. E., von Dorrien, C., & Oesterwind, D. (2021). Marine Protected Areas: At the Crossroads of Nature Conservation and Fisheries Management. In *Frontiers in Marine Science* (Vol. 8). Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.676264

Li, Y., Zheng, W., Dong, T., Yang, Y., Wang, S., Kang, Y., Liu, Y., Chen, Y., & Liu, D. (2026). The evolution and development of integrated coastal zone management in China since the 1950s. *Coastal Management, 54*, 42–65. https://doi.org/10.1080/08920753.2026.2623357

Long, R. D., Charles, A., & Stephenson, R. L. (2015). Key principles of marine ecosystem-based management. *Marine Policy*, *57*, 53–60. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.01.013

Marwa, T., Muizzuddin, Bashir, A., Andaiyani, S., & Cahyadi, A. (2024). Determinants of the Blue Economy Growth in the Era of Sustainability: A Case Study of Indonesia. *Economies*, *12*(11). https://doi.org/10.3390/economies12110299

Mestanza-Ramón, C., Chica-Ruiz, J. A., Anfuso, G., Mooser, A., Botero, C. M., & Pranzini, E. (2020). Tourism in continental Ecuador and the Galapagos Islands: An integrated coastal zone management (ICZM) perspective. *Water*. https://doi.org/10.3390/w12061647

Mestanza-Ramón, C., Capa, M. C. S., Figueroa Saavedra, H., & Rojas Paredes, J. (2019). Integrated coastal zone management in continental Ecuador and Galapagos Islands: Challenges and opportunities in a changing tourism and economic context. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su11226386

Nagabhatla, N., Hung, N. T., Tuyen, L. T., Ngoc Cam, V. T., Dhanraj, J., Thien, N. T., & Swierczek,

F. W. (2019). Ecosystem-based approach for planning research and capacity development for integrated coastal zone management in Southeast Asia. *APN Science Bulletin*, *9*(1), 3–9. https://doi.org/10.30852/sb.2019.537

Noor, N. M., & Abdul Maulud, K. N. (2022). Coastal Vulnerability: A Brief Review on Integrated Assessment in Southeast Asia. In *Journal of Marine Science and Engineering* (Vol. 10, Number 5). MDPI. https://doi.org/10.3390/jmse10050595

Ntona, M., & Morgera, E. (2018). Connecting SDG 14 with the other Sustainable Development Goals through marine spatial planning. *Marine Policy*, *93*, 214–222. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.020

Omeyer, L. C. M., Duncan, E. M., Aiemsomboon, K., Beaumont, N., Bureekul, S., Cao, B., Carrasco, L. R., Chavanich, S., Clark, J. R., Cordova, M. R., Couceiro, F., Cragg, S. M., Dickson, N., Failler, P., Ferraro, G., Fletcher, S., Fong, J., Ford, A. T., Gutierrez, T., … Godley, B. J. (2022). Priorities to inform research on marine plastic pollution in Southeast Asia. In *Science of the Total Environment* (Vol. 841). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156704

Prakoso, L. Y., Risahdi, M. ., Asih Yulianto, B. ., Yusnaldy , Y. ., & Lestari, A. (2025). Ancaman Non-Militer dan Strategi Penegakan Hukum Maritim Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(11), 3610–3617. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i11.32564

Rafiq, M. I., Banerjee, A., & Ribeiro-Navarrete, S. (2025). Investments, innovation and growth: a Panel-ARDL analysis of Southeast Asia's blue economy. *Review of Accounting and Finance*. https://doi.org/10.1108/raf-12-2024-0576

Roy, N. (2020). Reviewing ocean governance in Asia. *Asian Journal of Comparative Politics, 5*, 437–448. https://doi.org/10.1177/2057891119883127

Sabrina, O., & Putra, R. A. (2025). Navigating the Blue Economy: Indonesia's Regional Efforts in ASEAN to Support Sustainable Practices in Fisheries Sector. *Sustainability (Switzerland)*, *17*(15). https://doi.org/10.3390/su17156906

Saengsupavanich, C., Ratnayake, A. S., Yun, L. S., & Ariffin, E. H. (2023). Current challenges in coastal erosion management for southern Asian regions: examples from Thailand, Malaysia, and Sri Lanka. In *Anthropocene Coasts* (Vol. 6, Number 1). Springer. https://doi.org/10.1007/s44218-023-00030-w

Sarangi, U. (2022). Blue economy, blue finance and ocean governance for achieving sustainable development goals. *Natural Resources Forum*. https://doi.org/10.1111/1477-8947.12267

Saraswati, R., Widhi, P., Hananto, H., Prananda, R. R., Mahramhafiz, M., & Pennesi, L. (2025). The Role of Indonesia as a Presidency for ASEAN and Blue Economy's driver: SDG's Issues and Legal Perspective. *Universitas Diponegoro*, *21*(1), 180–202. https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.67157

Satiroğlu, E. (2024). Integrated Coastal Zone Management Studies in Turkey in the Context of the United Nations Sustainable Development Goals: An Evaluation Using Bibliometric Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, *16*(16). https://doi.org/10.3390/su16167028

Satizábal, P., Dressler, W. H., Fabinyi, M., & Pido, M. D. (2020). Blue economy discourses and practices: reconfiguring ocean spaces in the Philippines. *Maritime Studies*, *19*(2), 207–221. https://doi.org/10.1007/s40152-020-00168-0

Shampa, M. T. A., Shimu, N. J., Chowdhury, K. M. A., Islam, M. M., & Ahmed, M. K. (2023). A comprehensive review on sustainable coastal zone management in Bangladesh: Present status and the way forward. In *Heliyon* (Vol. 9, Number 8). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18190

Tafon, R. (2018). Taking power to sea: Towards a post-structuralist discourse theoretical critique of marine spatial planning. *Environment and Planning C: Politics and Space, 36*, 258–273. https://doi.org/10.1177/2399654417707527

Triyani, Prakoso, L. Y., & Suwarno, P. (2025). Marine Pollution Risk Management in Marine Resources Governance and Implications for the Blue Economy. Journal of Ecohumanism. 3(8), https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5764

Vázquez-Pinillos, F. J., Barragán Muñoz, J. M., & Ther Ríos, F. (2023). Delimiting coastal zones for integrated management: The case of the island and the sea of Chiloé (Chile). *Marine Policy*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105535

Yang, J. H., Yang, J. Y., & Chang, Y. (2026). Toward Sustainable Development in the Ocean: A Framework for Blue Economy Marine Spatial Planning. *Sustainable Development*, *34*(S1), 456–469. https://doi.org/10.1002/sd.70183

Zhang, S., Wu, Q., Butt, M., Lv, Y., & Wang, Y. (2024). Coastal cities governance in the context of integrated coastal zonal management: a sustainable development goal perspective under international environmental law for 'coastal sustainability'. *Frontiers in Marine Science*. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1364554